DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2020
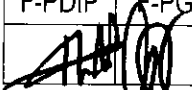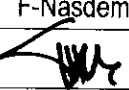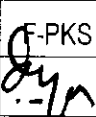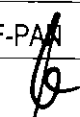
No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR/Komisi I
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR/Komisi I
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan	DPR/Komisi II
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/Komisi II
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH/ DPR/Komisi III
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	PEMERINTAH/ DPR/Komisi III
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR/Komisi IV
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/Komisi IV
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR/Komisi V
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR/Komisi V
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/Komisi VI
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/Komisi VI
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang	DPR/Komisi VII

F-PDIP	F-PG	F-Gerindra	F-Nasdem	F-PKB	F-Demokrat	F-PKS	F-PAN	F-PPP	Pemerintah

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/Komisi VII
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/Komisi VIII
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial	DPR/Komisi VIII
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR/Komisi IX
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR/Komisi IX
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/Komisi X
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR/Komisi X
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai	PEMERINTAH/ DPR/Komisi XI
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR/Komisi XI
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan	DPR/Badan Legislasi
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/Badan Legislasi
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila	DPR/Badan Legislasi
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/Badan Legislasi
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR/Anggota

F-PDIP	F-PG	F-Gerindra	F-Nasdem	F-PKB	F-Demokrat	F-PKS	F-PAN	F-PPP	Pemerintah
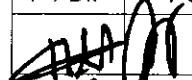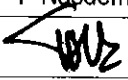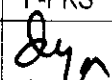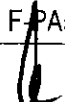
No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional	DPR/Anggota
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian (Omnibus Law)	DPR/Anggota
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR/Anggota
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/Anggota
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR/Anggota
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional	DPR/Anggota
34.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR/Anggota
35.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga	DPR/Anggota
36.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR/Anggota
37.	Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi	DPR/Anggota
38.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)	DPR/Anggota
39.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR/PEMERINTAH
40.	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)	PEMERINTAH
41.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)	PEMERINTAH
42.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	PEMERINTAH
43.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	PEMERINTAH
44.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	PEMERINTAH

F-PDIP	F-PG	F-Gerindra	F-Nasdem	F-PKB	F-Demokrat	F-PKS	F-PAN	F-PPP	Pemerintah

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH
45.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH
46.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara (Omnibus law)	PEMERINTAH
47.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	PEMERINTAH
48.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut	PEMERINTAH
49.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	PEMERINTAH
50.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPD
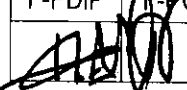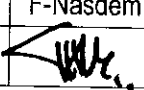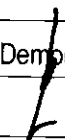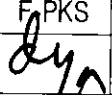
DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2020 YANG DITETAPKAN OLEH DPR, DPD, DAN PEMERINTAH UNTUK DILANJUTKAN PEMBAHASANNYA PADA DPR PERIODE 2019-2024 (*CARRY OVER*)	
1	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3	Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
4	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

F-PDIP	F-PG	F-Gerindra	F-Nasdem	F-PKB	F-Demokrat	F-PKS	F-PAN	F-PPP	Pemerintah

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

F-PDIP	F-PG	F-Gerindra	F-Nasdem	F-PKB	F-Demokrat	F-PKS	F-PAN	F-PPP	Pemerintah

c. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang semula usulan DPR/Komisi X menjadi usulan dari Pemerintah;

d. RUU tentang Keamanan Laut ditambahkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 usulan dari Pemerintah.

Jakarta, 16 Januari 2020

Badan Legislasi DPR RI
Ketua

DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH.

Kementerian Hukum dan HAM RI
Menteri,

PROF. YASONNA H. LAOLY, SH., M.SC., Ph.D.

Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI
Wakil Ketua,

DR. H. ALIRMAN SORI, SH., M.HUM., MM.

Kesimpulan:

Rapat Panja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Penyusunan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2020, menyetujui untuk menyepakati:

Jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 sebanyak 50 (lima puluh) RUU sebagaimana Draf B dengan menambah RUU tentang Keamanan Laut dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan catatan:

a. 2 (dua) RUU usulan Komisi X yang semula:
   - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan
   - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

   menjadi
   - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; dan
   - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

b. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial diganti dengan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang semula usulan Pemerintah menjadi usulan dari DPR/Badan Legislasi;